



## Melihat Kebijakan Kampus Merdeka dalam Konteks Neoliberalisme: Sebuah Relevansi dan Implikasi

Oleh: Mario Aden Bayu Valendo<sup>1</sup>

Ditulis pada Januari 2021

*“Critical citizens aren’t born, they’re made, and unless citizens are critically educated and well-informed, democracy is doomed to failure”<sup>2</sup>*

Kampus Merdeka merupakan kebijakan dalam payung besar “Merdeka Belajar” yang mendorong otonomi dan fleksibilitas pembelajaran di perguruan tinggi.<sup>3</sup> Kebijakan ini bertujuan guna menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan industri, serta dinamika masyarakat.<sup>4</sup> Salah satu landasan hukum yang menjadi dasar kebijakan ini merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.<sup>5</sup> Kebijakan Kampus Merdeka sendiri memiliki empat kebijakan turunan, yaitu otonomi perguruan tinggi untuk membuka atau mendirikan program studi baru, otomatisasi sistem akreditasi ulang bagi perguruan tinggi dan program studi, kemudahan bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum dan PTN Satuan Kerja guna menjadi PTN Badan Hukum tanpa terikat status akreditasi, serta kebijakan yang memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester.<sup>6</sup>

Diskursus publik beberapa bulan ini tentang kebijakan Kampus Merdeka agaknya telah menarik perhatian bagi para pengamat pendidikan tinggi di Indonesia sebagai salah satu kebijakan yang penulis nilai cukup memicu polemik. Salah satu narasi yang bernada kritis

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, menjabat sebagai Staf Divisi Hubungan Masyarakat Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Henry Giroux and Susan Searls Giroux, *Take Back Higher Education: Race, Youth, and The Crisis of Democracy in the Post-Civil Rights Era* (New York and Hampshire, United States and England: Palgrave Macmillan, 2004), 257.

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Buku Panduan: Merdeka Belajar - Kampus Merdeka,” Buku Panduan: Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (2020), 2-3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, January 24, 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>.



datang dari Charismiadji yang menyatakan bahwa ketika awal kebijakan ini dirilis, Kampus Merdeka tidak menyentuh pada aspek sumber daya manusia tenaga pendidik dan berpotensi adanya celah untuk praktik komersialisasi dalam pendidikan tinggi.<sup>7</sup> Pada narasi yang lain, kebijakan Kampus Merdeka dinilai oleh Wiwoho sebagai lompatan besar yang mampu mengantarkan lulusan pendidikan tinggi lebih mudah terserap ke dalam pasar industri dan dunia kerja.<sup>8</sup> Bukan hal yang mengherankan memang jika kebijakan ini mampu mendapatkan atensi cukup besar dari publik. Hal itu karena kebijakan ini hadir untuk menjawab masalah tingginya tingkat pengangguran terbuka yang berasal dari lulusan universitas—pada bulan Februari 2019 mencapai 6,24 persen<sup>9</sup>—yang dikendalikan oleh tidak selarasnya kompetensi lulusan universitas dengan kebutuhan pasar kerja.

Alih-alih menglorifikasi kebijakan Kampus Merdeka sebagai terobosan baru dalam mengatasi tantangan tentang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia melalui ranah pendidikan tinggi, diinisiasinya kebijakan ini sejatinya tidak terlepas dari konteks besar yang terjadi di tatanan global. Pada tulisan ini, penulis mempertanyakan mengapa kebijakan Kampus Merdeka relevan pada konteks politik-ekonomi saat ini dan bagaimana implikasinya terhadap dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Penulis ingin mengajak para pembaca merefleksikan kedua poin pernyataan tersebut pada bingkai argumentasi bahwa kebijakan Kampus Merdeka tidak lain adalah lahir dari kondisi ketika logika neoliberalisme dapat dipandang sebagai tatanan yang hegemon—yang berarti hampir sulit ada alternatif lainnya.

Hegemoni neoliberalisme tersebut selaras dengan pandangan Bauman dalam Bois yang menyatakan bahwa cara pandang neoliberalisme menjadi berbeda dengan ideologi lainnya karena hampir tidak adanya publik yang mempertanyakan neoliberalisme sehingga logika neoliberalisme menjadi tak tergantikan dan hampir tak dapat diubah dalam konteks realitas sosial yang ada.<sup>10</sup> Memaknai eksistensi neoliberalisme untuk masa kini tentu tidak sederhana karena situs-situs operasinya yang kian kompleks. Namun, hal utama yang dapat menjadi common ground untuk memahami neoliberalisme merujuk pada pendapat McChesney adalah

---

<sup>7</sup> Charismiadji adalah seorang Pengamat Pendidikan dari Center of Education Regulations and Development Analysis. Lihat CNN Indonesia, “Pengamat Kritis Kebijakan ‘Gimik’ Kampus Merdeka Ala Nadiem,” CNN Indonesia, January 31, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131070707-20-470343/pengamat-kiritisi-kebijakan-gimik-kampus-merdeka-ala-nadiem/>.

<sup>8</sup> Wiwoho saat tulisan ini dipublikasikan menjabat sebagai Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Lihat Zacharias Wuragil, ed., “Gebrakan Kampus Merdeka Nadiem Makarim, Ini Pesan Majelis Rektor,” Tempo.co, January 26, 2020, <https://tekno.tempo.co/read/1299714/gebrakan-kampus-merdeka-nadiem-makarim-ini-pesan-majelis-rektor>.

<sup>9</sup> Nurma Midayanti, “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020,” Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020 § (2020), pp. 1-20, 3.

<sup>10</sup> Henry Giroux and Susan Searls Giroux, *op.cit.*, p.251.



adanya konteks paradigma politik-ekonomi dalam kehidupan sosial yang sebesar-besarnya dikontrol oleh kepentingan aktor-aktor privat.<sup>11</sup> Hull mengungkapkan dua klaim penting untuk memahami pemikiran neoliberalisme, yakni pandangan bahwa pelaku pasar—atau aktor privat—lebih mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dibandingkan sentralisasi pengelolaan sumber daya oleh pemerintah, serta sentralisasi pengelolaan sumber daya justru merupakan pelanggaran atas kebebasan individu.<sup>12</sup>

Kebijakan Kampus Merdeka yang lahir dalam konteks neoliberalisme sebagai tatanan yang hegemon, nyatanya memiliki jejak historis yang relevan dengan ‘pendahulunya’. Situs-situs operasi neoliberalisme yang kompleks bisa kita sadari dengan tidak menemukannya sebatas pada ideasional semata. Neoliberalisme pada pendidikan tinggi memiliki cara-cara operasi yang beragam sehingga dapat saja tidak disadari.<sup>13</sup> Mahasiswa sejatinya memiliki pengalaman dalam membangun gerakan politik resistensi terhadap neoliberalisme. Misalnya saja pada awal kemunculan kebijakan tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) yang sempat mendapatkan penolakan dari aktivis mahasiswa UGM karena menganggap kebijakan tersebut akan melahirkan otonomi kampus yang menjadi dalih upaya melegalisasi praktik komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia dengan menanggalkan tanggung jawab negara di aspek pendidikan.<sup>14</sup> Berkaca pada awal tahun 2000an, kebijakan PT BHMN, menafsirkan menurut Hantoro adalah muncul karena kondisi negara yang terbelit krisis ekonomi sehingga mendorong privatisasi pendidikan oleh desakan IMF guna mengurangi subsidi pendidikan oleh negara.<sup>15</sup>

Relevansi lahirnya kebijakan Kampus Merdeka dengan logika pasar dari neoliberalisme dalam aspek pendidikan tinggi, berupaya makin memperkokoh pilar-pilar neoliberalisme melalui sektor pendidikan. Pendidikan tinggi semakin memiliki otonomi yang lebih leluasa lagi dalam rezim kebijakan Kampus Merdeka karena logika pasar kian dilegitimasi dengan harapan adanya *link and match* lulusan perguruan tinggi dengan

---

<sup>11</sup> Henry Giroux, “Neoliberalism, Corporate Culture, and the Promise of Higher Education: The University as a Democratic Public Sphere,” *Harvard Educational Review* 72, no. 4 (2002): pp. 425-463, 425.

<sup>12</sup> Dieter Plehwe, Bernhard Walpen, and Gisela Neunhoffer, eds., *Neoliberal Hegemony: A Global Critique* (Oxon, UK: Routledge, 2006), 141.

<sup>13</sup> Gaile Cannella and Mirka Koro-Ljungberg, “Neoliberalism in Higher Education: Can We Understand? Can We Resist and Survive? Can We Become Without Neoliberalism?,” *Cultural Studies ↔ Critical Methodologies* 17, no. 3 (2017): pp. 1-8, <https://doi.org/10.1177/1532708617706117>, 2.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Huda Tri Widiana yang kala itu pernah menjabat menjadi Presiden BEM KM UGM tahun 2000-2001. Lihat Luthfi Hamzah Husin, *Gerakan Mahasiswa Sebagai Kelompok Penekan: Studi Kasus Keluarga Mahasiswa UGM Dari Masa Orde Lama Hingga Pasca-Reformasi* (Yogyakarta, Indonesia: Penerbit PolGov, 2014), 114-115.

<sup>15</sup> *Ibid.*



kebutuhan dunia industri. Oleh karenanya, makna “merdeka” dari kebijakan Kampus Merdeka agaknya hanya menjadi diksi bahwa mahasiswa memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitas roda perekonomian negara, atau bahkan “bebas menekan kontrak untuk menjadi pekerja upahan”.<sup>16</sup> Pendidikan tinggi hanya dilihat sebagai industri penghasil tenaga kerja karena makna “merdeka” dari kebijakan ini sekadar mereproduksi logika lama pendidikan yang mendekati diri dengan logika pasar.<sup>17</sup> Pendapat tersebut dapat dicermati dari salah satu kebijakan Kampus Merdeka yang mendorong dipermudahnya PTN Badan Layanan Umum dan PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Hukum melalui deregulasi karena PTN non-Badan Hukum dianggap kurang memiliki otonomi dalam pengelolaan kurikulum dan finansial.<sup>18</sup> Upaya mereproduksi logika pasar, bahkan makin cepat dan kompleks, melalui kebijakan Kampus Merdeka jika dibandingkan kebijakan pendahulunya—yakni PT BHMN—adalah wujud realitas sosial yang menandai relevansi hegemoni logika neoliberalisme pada pendidikan tinggi hingga saat ini.

Pada satu titik di mana pengelolaan pendidikan tinggi berorientasi terhadap kepentingan pasar maka tuntutan akan alokasi sumber daya yang dimilikinya secara deterministik akan dilakukan seefisien mungkin. Efisiensi pengelolaan oleh aktor bisnis privat telah menginfiltirasi hingga mengintegrasikan diri ke dinamika pendidikan tinggi sebagai suatu layanan publik melalui kebijakan pembukaan program studi baru dalam kerangka Kampus Merdeka. Hal itu dipandang sebagai upaya minimalisasi *cost* atas kesempatan pemanfaatan sumber daya manusia lulusan pendidikan tinggi supaya dapat secepat mungkin menjadi aset produktif yang berkontribusi bagi perekonomian negara melalui mekanisme *link and match* antara program studi dan kebutuhan dunia industri. Perguruan tinggi dapat mengajukan pembukaan program studi baru melalui kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, maupun universitas ternama guna membuka peluang untuk penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja.<sup>19</sup> Singkat kata, peran program studi sebagai pabrik yang berupaya memproduksi lulusan-lulusan yang bernilai jual tinggi yang diperlukan oleh pasar kerja. Hal terkait program studi tersebut kian menjadi sejalan dengan istilah yang disebutkan oleh Aronowitz sebagai *knowledge factory*, yang mana mahasiswa

---

<sup>16</sup> Ben Laksana, “‘Merdeka Belajar’ Gaya Menteri Nadiem: Apanya Yang Merdeka?,” *Indoprogres*, September 15, 2020, <https://indoprogres.com/2020/09/merdeka-belajar-gaya-menteri-nadiem-apanya-yang-merdeka/>.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (January 24, 2020).

<sup>19</sup> *Ibid.*





hanya mendapatkan keterampilan semata, tanpa terikat dengan tuntutan berpikir kritis.<sup>20</sup> Pada hal yang lain tentang kontribusi aktor bisnis privat, merujuk pada buku *Take Back Higher Education*, disinggung pula tentang perubahan paradigma peristilahan bahasa dalam ranah pendidikan tinggi.<sup>21</sup> Terjadi pembingkaihan istilah mahasiswa sebagai konsumen, pimpinan perguruan tinggi sebagai CEO, serta penerimaan calon mahasiswa ke perguruan tinggi sebagai upaya penandatanganan kontrak sehingga pembingkaihan peristilahan tersebut menjadi tanda hilangnya persepsi publik tentang perguruan tinggi sebagai agensi publik dan pendidikan sebagai *public good*.<sup>22</sup> Tekanan untuk memprivatisasi pelayanan publik telah mengakibatkan perguruan tinggi mengalami disintegrasi peran, baik sebagai agensi publik maupun aktor kritis.<sup>23</sup>

Neoliberalisasi pendidikan tinggi melalui rezim kebijakan Kampus Merdeka juga memiliki implikasi pada dimensi yang lebih luas. Dorongan pengaruh pasar pada berbagai diskursus publik telah mampu mendefinisikan individu dan agensi-agensi sosial dengan ungkapan individualisme, kompetisi, dan konsumsi.<sup>24</sup> Pada pemahaman yang umum terkait neoliberalisme, era globalisasi neoliberal telah menumbuhkan kelompok yang disebut prekariat (*precariat*) sebagai akibat dari transformasi global, yang mana pasar ekonomi global didasarkan pada daya saing dan individualisme.<sup>25</sup> Tumbuh suburanya kelompok tersebut pada negara-negara industri dan industri baru dengan melimpahnya penawaran tenaga kerja murah patut disadari pula karena komitmen pasar terbuka yang mendorong adanya persaingan.<sup>26</sup> Kelompok prekariat dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang *precarious* (rawan) dan proletariat (pekerja atau buruh).<sup>27</sup> Berangkat dari berbagai elaborasi oleh Guy Standing di atas, kita dapat merefleksikan lulusan perguruan tinggi sebagai kelompok prekariat dari berbagai narasi pendidikan tinggi yang berupaya menciptakan mahasiswa yang berdaya saing. Pemberian hak kepada mahasiswa untuk menempuh studi hingga tiga semester di luar program studi sejatinya adalah dalih yang merespons sisi “kerawanan” kelompok prekariat. Permintaan kebutuhan budaya kerja saat ini yang lebih cenderung menginginkan spesialisasi

---

<sup>20</sup> Edward Carvalho and David Downing, eds., *Academic Freedom in the Post-9/11 Era* (New York, US: Palgrave Macmillan, 2010), 206.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p.205.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Henry Giroux, *op.cit.*, p.426.

<sup>25</sup> Guy Standing, *The Precariat: The New Dangerous Class* (London and New York, UK and US: Bloomsbury Academic, 2011), 26.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, p.7.



keterampilan sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki lulusan perguruan tinggi maka makin besar pula peluangnya untuk terserap ke dalam pasar kerja karena memiliki daya saing cukup. Proses *skilling up* terhadap lulusan pendidikan tinggi ini seolah-olah melupakan aspek lain yang lebih fundamental tentang peningkatan kualitas pekerjaan dan proteksi tenaga kerja.

Tak berhenti sampai di sana, neoliberalisme turut berimplikasi pula bagi dinamika demokrasi terkait kebebasan akademik di ranah pendidikan tinggi. Menilik ke belakang pada masa orde baru, Bourchier mengungkapkan bahwa prinsip tentang keteraturan dan struktur merupakan nilai-nilai kunci bagi pemerintahan Presiden Soeharto untuk menjaga eksistensi sistem politik dan ekonomi Indonesia yang kapitalistik yang mengasumsikan bahwa logika pasar menjadi dasar fundamental dalam hubungan sosial di dalam negara.<sup>28</sup> Dalam buku *The Terror of Neoliberalism* diungkapkan suatu paradigma bahwa bagaimana neoliberalisme berkontribusi terhadap hancurnya demokrasi; logika pasar yang mendorong praktik-praktik neoliberal dapat mengubah kebijakan demokratis yang ditujukan untuk kepentingan publik, menjadi kebijakan korporasi yang hanya mendukung kepentingan-kepentingan dari pasar.<sup>29</sup> Opresi terhadap kemerdekaan yang sesungguhnya dari kampus—kebebasan berpikir, berserikat, berekspresi, dan intelektual—adalah eksploitasi pasar dalam ruang-ruang demokrasi, pasar menginginkan stabilitas dan keteraturan kondisi yang memungkinkan adanya perputaran kapital secepat mungkin. Adanya pemikiran kritis dan aksi-aksi politik resistensi terhadap eksistensi pasar dalam ranah pendidikan tinggi hanya akan menciptakan ketidakstabilan dan ketidakefisienan pasar dalam mengalirkan kapital. Upaya mereduksi pendidikan tinggi menjadi sekadar pelayan bagi pasar sangat bertolak belakang terhadap tanggung jawab sosial dalam memberikan pendidikan bagi warga negara guna menjaga inklusivitas ruang-ruang publik yang demokratis.<sup>30</sup>

Hingga pada akhirnya, kebijakan Kampus Merdeka hanya menjadi pelayan bagi logika pasar yang semakin memperkuat pilar-pilar neoliberalisme dalam pendidikan tinggi guna mempercepat perputaran kapital melalui integrasi aktor privat dalam dinamika pendidikan tinggi, penciptaan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat dengan tumbuh suburnya kelas prekariat oleh lulusan-lulusan pendidikan tinggi, serta berangsur-angsur terkikisnya ruang demokrasi publik di pendidikan tinggi. Dengan demikian, alih-alih memandangnya sebagai

---

<sup>28</sup> Ben Laksana, *loc.cit.*

<sup>29</sup> Edward Carvalho and David Downing, *op.cit.*, p.205.

<sup>30</sup> Henry Giroux and Susan Searls Giroux, *op.cit.*, p.254.



sumber keuntungan ekonomi, pendidikan tinggi perlu lebih dilihat sebagai ruang demokrasi yang memungkinkan para mahasiswa belajar untuk dirinya, mempertanyakan otoritas pemegang kuasa, mengembalikan keterlibatan warga negara yang ideal, mempertegas pentingnya eksistensi kepentingan publik, serta memberikan perbedaan yang lebih baik ke masyarakat.<sup>31</sup> Penulis menyadari betul bahwa sulit bagi pendidikan tinggi untuk melepaskan dirinya dari logika neoliberalisme dewasa ini. Bagaikan mencabut pohon beringin tua dari tanahnya, sesukar itulah membayangkan realitas sosial di pendidikan tinggi tanpa pengaruh neoliberalisme. Perlu adanya upaya rekonstruksi sosial secara kolektif untuk benar-benar menumbangkan pilar-pilar neoliberalisme di pendidikan tinggi dengan terus menjaga kesuburan pemikiran kritis dengan tetap mempertanyakan hegemoni dari tatanan neoliberalisme.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, p.276.



## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik, and Nurma Midayanti, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020* (2020).
- Cannella, Gaile, and Mirka Koro-Ljungberg. "Neoliberalism in Higher Education: Can We Understand? Can We Resist and Survive? Can We Become Without Neoliberalism?" *Cultural Studies ↔ Critical Methodologies* 17, no. 3 (2017): 1–8. <https://doi.org/10.1177/1532708617706117>.
- Carvalho, Edward, and David Downing, eds. *Academic Freedom in the Post-9/11 Era*. New York, US: Palgrave Macmillan, 2010.
- CNN Indonesia. "Pengamat Kritis Kebijakan 'Gimik' Kampus Merdeka Ala Nadiem." CNN Indonesia, January 31, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131070707-20-470343/pengamat-kiritisi-kebijakan-gimik-kampus-merdeka-ala-nadiem/>.
- Giroux, Henry, and Susan Searls Giroux. *Take Back Higher Education: Race, Youth, and The Crisis of Democracy in the Post-Civil Rights Era*. New York and Hampshire, United States and England: Palgrave Macmillan, 2004.
- Giroux, Henry. "Neoliberalism, Corporate Culture, and the Promise of Higher Education: The University as a Democratic Public Sphere." *Harvard Educational Review* 72, no. 4 (2002): 425–463.
- Husin, Luthfi Hamzah. *Gerakan Mahasiswa Sebagai Kelompok Penekan: Studi Kasus Keluarga Mahasiswa UGM Dari Masa Orde Lama Hingga Pasca-Reformasi*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit PolGov, 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Mendikbud Luncurkan Empat Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, January 24, 2020. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/mendikbud-luncurkan-empat-kebijakan-merdeka-belajar-kampus-merdeka>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Merdeka Belajar: Kampus Merdeka." January 24, 2020.





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, and Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Buku Panduan: Merdeka Belajar - Kampus Merdeka § (2020).

Laksana, Ben. “‘Merdeka Belajar’ Gaya Menteri Nadiem: Apanya Yang Merdeka?” Indoprogess, September 15, 2020. <https://indoprogess.com/2020/09/merdeka-belajar-gaya-menteri-nadiem-apanya-yang-merdeka/>.

Plehwe, Dieter, Bernhard Walpen, and Gisela Neunhoffer, eds. *Neoliberal Hegemony: A Global Critique*. Oxon, UK: Routledge, 2006.

Standing, Guy. *The Precariat: The New Dangerous Class*. London and New York, UK and US: Bloomsbury Academic, 2011.

Wuragil, Zacharias, ed. “Gebrakan Kampus Merdeka Nadiem Makarim, Ini Pesan Majelis Rektor.” Tempo.co, January 26, 2020. <https://tekno.tempo.co/read/1299714/gebrakan-kampus-merdeka-nadiem-makarim-ini-pesan-majelis-rektor>.